

ABSTRAK

PERAN INTERVENSI *NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION* DALAM MENDUKUNG *COLLECTIVE ACTION* PENGELOLAAN RAJUNGAN DI PANTAI TIMUR LAMPUNG

Oleh

RIZANI

Implementasi pengelolaan rajungan berkelanjutan membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan melibatkan kelompok nelayan dalam berbagai program atau kegiatan. Membangun keterlibatan kelompok nelayan tidaklah mudah, terdapat sejumlah tantangan di antaranya tingkat pengetahuan, kesadaran dan kapasitas yang dimiliki oleh nelayan itu sendiri. Kehadiran *non governmental organization* (NGO) sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas kelompok nelayan untuk melakukan tindakan bersama (*collective action*) menuju pengelolaan rajungan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan rajungan dan menganalisis peran intervensi NGO dalam mendukung *collective action* kelompok nelayan di Pantai Timur Lampung. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode *participatory action research* (PAR). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD), *participant observation* dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan metode *regulatory impact analysis* (RIA) untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan rajungan. Selanjutnya, untuk mengetahui peran intervensi NGO dalam *collective action* pengelolaan rajungan, peneliti mengacu pada metode yang dikembangkan oleh Barnes dan Learhoven (2013) dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan rajungan di antaranya: kepatuhan terhadap ketentuan ukuran tangkapan rajungan, penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak selektif, dan perlindungan habitat rajungan. Sementara dalam peran intervensi yang dilakukan oleh NGO

menunjukkan perubahan yang fundamental terutama dalam aktivitas yang berhubungan dengan karakteristik sumber daya alam dan kelompok, fungsi *collective action* dan durabilitas *collective action*. Namun, masih dibutuhkan peningkatan terhadap aspek kelembagaan dan manajerial organisasi, terutama dalam membangun kepercayaan diri kelompok nelayan sebagai aktor penting dalam pengelolaan rajungan. Pemerintah perlu mengembangkan berbagai strategi sebagai opsi kebijakan diantaranya; pengembangan teknologi penangkapan dan pengawasan, melakukan transisi alat tangkap dan memberikan *reward* atas praktik-praktik baik yang dilakukan oleh kelompok nelayan. Selanjutnya, aktivitas kampanye dan publikasi media dapat dikembangkan untuk mengetahui *collective action* yang dilakukan oleh NGO dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama rajungan.

Kata kunci: *Collective action*, kebijakan, peran NGO, pengelolaan rajungan.

ABSTRACT

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION INTERVENTION IN SUPPORTING COLLECTIVE ACTION IN CRAB MANAGEMENT ON THE EAST COAST OF LAMPUNG

By

RIZANI

Implementation of sustainable crab management requires support and involvement from various parties. One strategy that is carried out is to involve fishermen groups in various programs or activities. Building the involvement of fishermen groups is challenging, there are a number of challenges including the level of knowledge, awareness and capacity of the fishermen themselves. The presence of non-governmental organizations (NGOs) is critical for improving and strengthening the capacity of fishermen groups to take collective action toward sustainable crab management. The purpose of this study is to analyze the implementation of crab management policies and analyze the role of NGO intervention in supporting collective action of fishermen groups on the East Coast of Lampung. The research was conducted with a qualitative approach through the participatory action research (PAR) method. Data collection was carried out through in-depth interviews, focus group discussions (FGD), and participant observation and documentation studies. The data were gathered and evaluated using the regulatory impact analysis (RIA) method to determine the effectiveness of crab management policies. Furthermore, to determine the role of NGO intervention in collective action for crab management, researchers refer to the method developed by Barnes and Learhoven (2013) in natural resource management. The results of the study indicate that there are still a number of challenges in implementing crab management policies, including: compliance with crab catch size provisions, the use of non-selective fishing gear, and protection of crab habitat. Meanwhile, the role of intervention carried out by

NGOs shows fundamental changes, especially in activities related to the characteristics of natural resources and groups, the function of collective action and the durability of collective action. However, improvements are still needed in the institutional and managerial aspects of the organization, especially in building the self-confidence of fishermen groups as important actors in crab management. The government needs to develop various strategies as policy options including; developing fishing and monitoring technology, transitioning fishing gear and providing rewards for good practices carried out by fishing groups. Furthermore, campaign activities and media publications can be developed to find out the collective action carried out by NGOs in managing natural resources, especially crabs.

Keywords: Collective action, policy, role of NGOs, crab management.